



Dekonstruksi Epistemik Investasi Sosial dalam Bayang-Bayang Neoliberalisme : Kritik terhadap Rasionalitas Tekno-Birokratis Kebijakan Kesejahteraan di Kabupaten Bima

Wawan Mulyawan^{1*}, Muhamad Lutfi²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima, Indonesia

Email : wawanmulyawan22@yahoo.com^{1*}, lutfi83.stisipmbojo@gmail.com²

Korespondensi penulis : wawanmulyawan22@yahoo.com

Abstract. *This study aims to deconstruct the technocratic rationality underpinning social investment policies implemented in Bima Regency by critically illuminating the ideological co-optation of neoliberalism, which manifests through the language of modernity, productivity, and pseudo-empowerment. Within a structurally asymmetrical and historically marginalized context, the global paradigm of social investment has been adopted in an ahistorical and depoliticized manner, resulting in policy architectures that are both irrelevant and exclusionary. Employing a critical-qualitative approach with a deconstructive design rooted in post-structuralist epistemology, this research conceptualizes public policy as an ideological text that demands reinterpretation and recontextualization. Data were obtained through rigorous analysis of institutional and academic literature and interpreted using the framework of Critical Discourse Analysis (CDA). The findings reveal that social investment policies in Bima function not as instruments of structural transformation but rather as symbolic mechanisms of ideological co-optation, which conceal systemic inequality under the guise of bureaucratic performance metrics. The local state apparatus has lost its articulative capacity, subordinated to a global epistemology that is profoundly indifferent to local particularities. Terminologies such as “empowerment” and “human capacity” are reduced to administrative slogans devoid of redistributive justice. Consequently, the social investment paradigm has shifted the state’s role from an agent of justice to a managerial entity of poverty normalizing exclusion and reinforcing the subordination of the subaltern populace.*

Keywords: *Neoliberal Co-optation, Technocratic Rationality, Social Investment Policy, Critical Discourse Analysis*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi rasionalitas teknokratis di balik kebijakan investasi sosial yang diimplementasikan di Kabupaten Bima, dengan menyoroti kooptasi ideologis neoliberalisme yang termanifestasi dalam bahasa modernitas, produktivitas, dan pemberdayaan semu. Dalam konteks struktural yang timpang dan historis yang marginal, paradigma investasi sosial global diterapkan secara ahistoris dan depolitisasi, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak relevan dan bersifat eksklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain dekonstruktif berbasis epistemologi post-strukturalis, yang menempatkan kebijakan publik sebagai teks ideologis yang layak didiseminasikan ulang. Data dikumpulkan melalui telaah literatur institusional dan akademik, serta dianalisis menggunakan teknik Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi sosial di Bima tidak berfungsi sebagai proyek transformatif, melainkan sebagai instrumen kooptasi simbolik yang menyamarkan ketimpangan struktural dalam kemasan indikator kinerja. Negara lokal kehilangan kapasitas artikulatif karena tunduk pada epistemologi global yang tidak sensitif terhadap partikularitas lokal. Terminologi seperti “pemberdayaan” dan “kapasitas manusia” direduksi menjadi slogan administratif tanpa basis distribusi keadilan. Dengan demikian, paradigma ini telah menggeser orientasi negara dari agensi keadilan menjadi manajer kemiskinan yang menormalisasi eksklusi dan memperdalam subordinasi masyarakat subaltern.

Kata Kunci: Kooptasi Neoliberal, Rasionalitas Teknokratis, Kebijakan Investasi Sosial, Analisis Wacana Kritis

1. PENDAHULUAN

Dalam wacana kontemporer mengenai rekonstruksi negara kesejahteraan, kebijakan sosial tidak lagi dipahami semata-mata sebagai respons karitatif terhadap ketimpangan struktural, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membentuk konfigurasi ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). Transformasi ini mencerminkan

pergeseran paradigma dari logika kompensatoris menuju orientasi investasi sosial, di mana negara dituntut tidak hanya memperbaiki kerusakan sosial yang telah terjadi, tetapi lebih jauh lagi, mempersenjatai warga negara dengan kemampuan agar mampu bertahan dan bersaing dalam lanskap ekonomi global yang volatil. Namun demikian, jika paradigma ini diterapkan secara sembrono dan tanpa kesadaran atas kontekstualitas spasial-politik tertentu, terutama dalam entitas lokal seperti Kabupaten Bima, maka bukan hanya sekadar kegagalan administratif yang akan terjadi, tetapi sebuah disfungsi sistemik yang menghancurkan nilai-nilai demokrasi partisipatif dan keadilan distributif.

Kabupaten Bima, sebagai entitas administratif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengalami friksi ganda: di satu sisi, tuntutan globalisasi menuntut penyesuaian terhadap logika investasi sosial berbasis produktivitas kognitif; di sisi lain, struktur ekonomi lokal yang masih bertumpu pada sektor informal dan agraris menjadikan transisi ke arah ekonomi berbasis keterampilan sebagai bentuk kekerasan simbolik yang tersembunyi. Dalam kondisi ini, penerapan kebijakan sosial yang berorientasi pada investasi manusia bukan hanya tidak relevan, melainkan berpotensi menciptakan reproduksi ketimpangan antar kelas sosial dan antara pusat dan pinggiran. Wacana tentang “prepare rather than repair” (Esping-Andersen, 2002), yang menjadi jantung dari paradigma investasi sosial, menjadi semacam utopia teknokratis ketika dihadapkan dengan realitas bahwa mayoritas populasi Kabupaten Bima masih bergulat dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang paling fundamental.

Buku *The World Politics of Social Investment* yang disunting oleh Garritzmann, Häusermann, dan Palier (2022), menyajikan kerangka teoretik yang komprehensif mengenai dinamika politik investasi sosial dalam konteks negara-negara kapitalis. Namun, ketika kerangka ini diterapkan pada wilayah periferal seperti Kabupaten Bima, kita justru dihadapkan pada kegagalan logika universalistik dalam membaca konteks partikular. Dalam spektrum ini, intervensi negara yang membungkus diri dalam bahasa “kapasitas manusia” dan “mobilisasi keterampilan” berpotensi mengaburkan relasi kuasa yang sesungguhnya tengah bekerja—yakni kooptasi politik lokal oleh agenda-agenda pembangunan global yang sarat dengan motif neoliberal. Transformasi kapitalisme kontemporer, sebagaimana dijabarkan dalam buku tersebut, bukanlah transformasi netral, melainkan transformasi yang sarat dengan intensi hegemonik, di mana negara-negara berkembang dipaksa untuk menyesuaikan diri atau tersingkir dari orbit kapitalisme global.

Lebih jauh, dalam konteks Bima, ide tentang investasi sosial sering kali direduksi menjadi program pelatihan kerja sporadis atau pembangunan infrastruktur pendidikan yang tidak sinkron dengan kebutuhan pasar lokal. Tidak terdapat refleksi kritis mengenai relasi

antara struktur ekonomi eksploitatif dan kebijakan sosial yang dibentuk. Alih-alih menciptakan mobilitas vertikal dan keadilan sosial, yang terjadi adalah institusionalisasi ketergantungan masyarakat terhadap program-program negara yang bersifat temporer, insidental, dan penuh pretensi pemberdayaan. Dalam konteks ini, kita melihat apa yang disebut oleh Garritzmann dkk. sebagai ketegangan antara “politicization without reform” dan “reform without politicization”—yakni situasi ketika kebijakan sosial dirancang tanpa melibatkan artikulasi kepentingan publik yang otentik, atau sebaliknya, ketika terjadi debat politik yang intens tanpa diiringi perubahan kebijakan substantif.

Kemiskinan struktural dan ketimpangan akses terhadap sumber daya manusia dan modal sosial menjadi dua variabel utama yang membuat paradigma investasi sosial sulit diimplementasikan secara bermakna di Bima. Ketika program kebijakan diformulasikan berdasarkan indikator makroekonomi dan asumsi rasionalitas individual dalam pasar tenaga kerja, maka eksklusi terhadap kelompok-kelompok rentan menjadi tidak terelakkan. Dalam hal ini, pendekatan investasi sosial yang diadopsi oleh banyak institusi internasional, seperti OECD dan World Bank, tidak hanya gagal membaca kompleksitas lokal, tetapi juga turut melanggengkan struktur dominasi melalui mekanisme depolitisasi masalah-masalah ketimpangan.

Ketegangan epistemik antara pendekatan universalisasi kebijakan dan realitas partikularistik Bima merefleksikan problem mendasar dalam penerjemahan paradigma global ke dalam praktik lokal. Kesenjangan antara logika teknokratik kebijakan dan dimensi afektif-politik masyarakat justru memperlebar jarak antara negara dan rakyat. Dalam konteks Bima, implementasi kebijakan sosial seringkali menjadi semacam ritual administratif semata, tanpa internalisasi nilai dan tujuan dari investasi sosial itu sendiri. Di sinilah letak beban moral dan politiknya: bahwa negara bukan sekadar gagal menyediakan perlindungan sosial yang memadai, tetapi lebih parah lagi ia gagal dalam menghadirkan keadilan struktural yang menjadi prasyarat lahirnya masyarakat adil dan berdaya.

Paradoks lain yang mencuat dalam praktik kebijakan sosial di Bima adalah ketergantungan pada proyek-proyek donor atau anggaran berbasis proyek jangka pendek yang mengutamakan output kuantitatif ketimbang dampak sosial jangka panjang. Dalam kerangka seperti itu, investasi sosial tidak lebih dari sebuah komoditas politik, alat legitimasi kekuasaan lokal, dan sarana mobilisasi elektoral. Hal ini menjadikan kebijakan sosial sebagai medan kooptasi, bukan transformasi. Maka, ketika warga miskin diberikan pelatihan keterampilan tanpa akses ke pasar kerja yang adil, atau ketika perempuan diberdayakan secara nominal

namun tetap dibelenggu oleh sistem patriarkal yang sistemik, kita menyaksikan pembusukan makna dari “investasi sosial” itu sendiri.

Dengan demikian, kerangka teori investasi sosial sebagaimana dikembangkan oleh Garritzmann dkk., meskipun kuat dalam menjelaskan transformasi welfare state di negara-negara maju, memerlukan dekonstruksi kritis ketika diterapkan di wilayah-wilayah marjinal seperti Kabupaten Bima. Tantangannya bukan sekadar teknis atau administratif, melainkan epistemik dan ideologis: bagaimana menghindari kolonialisasi kebijakan oleh logika global yang ahistoris dan tidak sensitif terhadap dinamika lokal. Jawabannya bukan pada penolakan total atas paradigma investasi sosial, melainkan pada rekonstruksi kritis atas makna, logika, dan aktor-aktor yang terlibat dalam praktik kebijakan sosial.

Sebagai penegasan bahwa ekonomi-politik investasi sosial di Bima merepresentasikan sebuah ironi struktural: di saat negara menggembar-gemborkan retorika pemberdayaan, yang terjadi justru represi epistemik dan marginalisasi kebijakan yang memihak kelas subaltern. Paradigma investasi sosial perlu ditransformasikan bukan hanya secara teknis, tetapi secara etis dan politis, agar mampu menjadi alat perjuangan bagi emansipasi sosial, bukan sekadar kendaraan akomodasi elite birokrasi. Hanya dengan demikian, kebijakan sosial dapat menjelma sebagai medium transformatif dalam membangun masyarakat Bima yang inklusif, adil, dan berdaulat secara sosial-ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi dekonstruktif yang bersandar pada epistemologi post-strukturalis. Jenis penelitian ini bukan sekadar bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial, tetapi secara lebih radikal mengeksplorasi logika-logika tersembunyi di balik kebijakan investasi sosial yang diterapkan secara universalistik di wilayah perifer seperti Kabupaten Bima. Dalam bingkai teoretik yang dipengaruhi oleh pemikiran Foucault dan Derrida, kebijakan publik diposisikan sebagai teks yang dapat dibedah, dipertanyakan, dan direkontekstualisasi melalui pembacaan ulang atas diskursus dominan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan narasi kebijakan sosial sebagai arena kontestasi pengetahuan (knowledge/power nexus) antara rasionalitas teknokratis dan kebutuhan partikularistik masyarakat lokal.

Sumber data utama penelitian ini berasal dari dua jenis bahan: (1) dokumen kebijakan dan literatur institusional, seperti publikasi OECD, World Bank, dan Kementerian Sosial RI, yang mengafirmasi paradigma investasi sosial sebagai proyek modernitas, serta (2) literatur teoritik dan kritik akademik, termasuk karya-karya Garritzmann et al. (2022), Esping-

Andersen, Bonoli, dan Jenson, yang menjadi referensi konseptual utama dalam memetakan arsitektur ideologis dari investasi sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, studi pustaka yang intensif, dan triangulasi pemikiran kritis melalui pencocokan wacana global dengan praktik lokal. Data ini dianalisis secara interpretatif dan dialektik, bukan untuk mencapai kesimpulan objektif, tetapi untuk membuka ruang tafsir baru terhadap praksis kebijakan sosial yang berlangsung.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) dengan fokus pada pembongkaran narasi hegemonik dan pelacakan terhadap represi epistemik yang terjadi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan sosial. Penelitian ini memosisikan kebijakan sebagai konstruksi kuasa, dan karena itu, setiap terminologi seperti "pemberdayaan", "mobilisasi keterampilan", atau "produktivitas manusia" dianalisis dalam relasinya dengan logika neoliberalisme global yang berupaya mengobjektifikasi subjek warga negara. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak bertujuan untuk mencari kebenaran tunggal, melainkan untuk mengungkap lapisan-lapisan makna yang terselubung di balik kebijakan yang tampak teknokratis, namun sebenarnya sarat dengan intensi ideologis dan konsekuensi politik-ekonomi yang asimetris terhadap masyarakat lokal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kooptasi Neoliberalisme dan Represi Epistemik dalam Kebijakan Investasi Sosial di Kabupaten Bima

Dalam konteks kebijakan sosial yang diimplementasikan di Kabupaten Bima, terdapat gejala sistematis dari kooptasi ideologis yang secara hegemonik membungkus dirinya dalam narasi teknokratis investasi sosial. Fenomena ini bukan sekadar manifestasi dari logika globalisasi, tetapi merupakan instrumen struktural dalam menegaskan dominasi rezim neoliberal atas tatanan lokal. Kebijakan sosial yang seharusnya menjadi arena artikulasi kebutuhan kolektif justru menjadi alat represi epistemik yang mengaburkan ketimpangan sosial melalui bahasa modernitas dan pemberdayaan semu. Dalam kerangka ini, negara bertindak bukan sebagai penjamin kesejahteraan, tetapi sebagai fasilitator akomodasi kapitalisme global dalam ruang-ruang administratif lokal.

Hal yang paling mencolok adalah cara terminologi "investasi sosial" direduksi menjadi proyek pelatihan keterampilan dangkal dan pembangunan infrastruktur simbolik yang jauh dari realitas kebutuhan struktural masyarakat. Ini selaras dengan kritik Jenson (2010) dan Morel et al. (2012) yang menyoroti bagaimana investasi sosial dalam konteks global selatan kerap disimplifikasi menjadi program tangkas (quick-fix) yang bersifat depolitisasi. Di Bima, proyek

pelatihan kerja menjadi representasi nyata dari kegagalan ideologis: tidak ada hubungan organik antara pelatihan dan peluang kerja riil. Dengan demikian, pelatihan hanya berfungsi sebagai artefak administratif demi pencapaian indikator kinerja.

Lebih lanjut, analisis dekonstruktif terhadap kebijakan lokal menunjukkan bahwa orientasi investasi sosial di Bima merupakan turunan langsung dari kerangka institusional OECD dan World Bank yang mengedepankan "prepare rather than repair" (Esping-Andersen, 2002), tanpa mempertimbangkan ketimpangan historis yang telah membatasi akses terhadap sumber daya kognitif. Rasionalitas kebijakan tidak dibentuk oleh konteks lokal, tetapi oleh imperatif global yang ahistoris dan dekonstekstual. Hal ini menghasilkan diskontinuitas antara kebijakan dan realitas sosial masyarakat Bima yang masih berakar pada struktur ekonomi agraris dan sektor informal.

Rezim pengetahuan yang terbentuk melalui kebijakan sosial ini kemudian mengukuhkan struktur eksklusif. Pengetahuan lokal dianggap irasional, usang, dan tidak produktif; sementara narasi teknokratik dijadikan satu-satunya bahasa sah dalam merumuskan kebijakan. Situasi ini menciptakan what Garritzmann et al. (2022) sebut sebagai ketegangan antara "reform without politicization" dan "politicization without reform." Negara hadir sebagai aktor netral padahal sesungguhnya ia memainkan peran ideologis dalam membentuk apa yang dianggap sebagai kebutuhan sosial yang valid.

Dengan menggali lebih dalam, tampak bahwa kooptasi kebijakan investasi sosial ini memperkuat relasi patron-klien antara elite lokal dan masyarakat subaltern. Program sosial dikemas sebagai bantuan, bukan sebagai hak, dan partisipasi masyarakat direduksi menjadi bentuk representasi administratif tanpa substansi deliberatif. Dalam hal ini, investasi sosial bukan menjadi alat emansipasi, melainkan alat kooptasi dan disiplin sosial. Negara lokal kehilangan kapasitas untuk menjadi mediasi aspirasi karena seluruh struktur perumusan kebijakan sudah terdikte oleh epistemologi global.

Selain itu, proyek investasi sosial gagal mengatasi fragmentasi sosial karena ia tidak menyentuh akar ketimpangan: ketimpangan lahan, akses pendidikan bermutu, dan ketidaksetaraan gender. Aspek-aspek ini justru dipinggirkan melalui logika pengukuran kuantitatif dan indikator kinerja sektoral yang semu. Dalam kondisi ini, indikator pembangunan bukan menjadi refleksi kesejahteraan, melainkan ilusi performativitas institusional. Negara menciptakan kenyataan statistik yang tidak koheren dengan pengalaman material masyarakat.

Implikasi dari kooptasi ini sangat dalam, karena ia bukan hanya menciptakan kegagalan kebijakan, melainkan juga menciptakan kerusakan epistemik: masyarakat dipaksa percaya

bahwa apa yang tidak bekerja adalah sesuatu yang wajar. Ideologi meritokrasi dan self-help mengikis solidaritas kolektif dan menggantinya dengan logika persaingan dalam mengakses sumber daya negara. Proses ini membentuk subjek neoliberal yang pasif secara politik namun aktif secara administratif.

Dengan demikian, indikator pertama ini menyimpulkan bahwa kebijakan investasi sosial di Kabupaten Bima bukanlah proyek transformatif sebagaimana yang dibayangkan dalam kerangka teoretik Garritzmann dkk., melainkan instrumen kooptasi yang menyamarkan reproduksi ketimpangan struktural dalam narasi pembangunan manusia. Yang terjadi bukan transformasi, tetapi normalisasi ketidakadilan melalui rasionalitas administratif yang tidak memihak.

Kegagalan Negara dalam Membangun Keadilan Distributif melalui Rasionalitas Investasi Sosial

Paradigma investasi sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Häusermann, Garritzmann, dan Palier (2022), menekankan pergeseran negara kesejahteraan dari peran kompensatoris menjadi aktor penguat kapasitas individual. Dalam konteks negara-negara maju, transformasi ini dianggap progresif karena bertumpu pada penguatan sumber daya manusia sejak usia dini hingga usia produktif. Namun, ketika paradigma ini diterjemahkan secara normatif dalam konteks struktural yang timpang seperti di Kabupaten Bima, yang terjadi adalah kegagalan kebijakan yang lebih bersifat sistemik daripada sekadar administratif. Negara tidak hadir sebagai fasilitator keadilan, melainkan sebagai distributor ilusi kesetaraan.

Kegagalan ini tampak dalam cara negara merancang intervensi kebijakan yang lebih berorientasi pada output administratif ketimbang outcome sosial. Pemerintah lokal didorong untuk memenuhi indikator-indikator kinerja investasi sosial seperti jumlah pelatihan yang dilakukan, angka keikutsertaan warga, atau persentase sekolah yang dibangun namun tidak ada mekanisme kritis yang mengevaluasi apakah pelatihan tersebut meningkatkan akses terhadap pekerjaan bermutu atau apakah pendidikan tersebut membuka ruang mobilitas vertikal nyata. Dalam logika ini, investasi sosial tidak lebih dari sekadar kontainer simbolik yang membungkus kekosongan substansi keadilan distributif.

Rasionalitas kebijakan yang berbasis data kuantitatif justru mengaburkan struktur ketimpangan yang inheren. Ketika angka partisipasi meningkat, negara mengklaim keberhasilan, meskipun tidak ada perubahan dalam distribusi kesejahteraan atau pengurangan kemiskinan absolut. Hal ini selaras dengan apa yang disebut Hemerijck (2013) sebagai "illusion of policy success" di mana keberhasilan kebijakan diukur dari kinerja administratif dan bukan dari transformasi struktural. Negara kemudian mengklaim dirinya berhasil melalui

retorika keberhasilan birokratis, sembari mengabaikan kenyataan bahwa kelompok paling rentan tetap terpinggirkan.

Kondisi ini diperparah oleh absennya partisipasi deliberatif dalam proses formulasi kebijakan. Di Kabupaten Bima, forum-forum musrenbang dan penyusunan rencana pembangunan daerah cenderung bersifat seremoni administratif daripada arena demokrasi substantif. Akibatnya, kebijakan yang dirumuskan tidak mewakili kebutuhan partikular masyarakat, terutama kelompok marginal seperti petani kecil, perempuan kepala keluarga, dan pekerja sektor informal. Negara mendesain kebijakan berdasarkan kalkulasi makroekonomi yang tidak merepresentasikan dinamika lokal secara akurat.

Dengan demikian, terjadi ketegangan epistemik antara realitas sosial dan logika kebijakan. Rasionalitas investasi sosial yang seharusnya memberdayakan warga menjadi justru memperkuat dominasi negara atas subjek kebijakan. Negara beroperasi dalam logika paternalistik menganggap masyarakat tidak tahu apa yang mereka butuhkan, dan karenanya negara harus mendefinisikan kebutuhan mereka. Dalam struktur ini, hak-hak sosial dikondisikan oleh perilaku administratif warga negara: mereka yang disiplin, hadir, dan patuh terhadap logika birokrasi diberi akses; mereka yang menolak tunduk dianggap tidak layak menerima intervensi.

Salah satu contoh paling konkret dari kegagalan distribusi ini adalah dalam kebijakan pelatihan keterampilan berbasis dana APBD dan program pemberdayaan perempuan. Pelatihan menjahit, tata rias, dan pengolahan makanan ringan tidak diintegrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, sehingga pelatihan hanya menghasilkan output tanpa outcome. Kelompok perempuan yang dilatih tidak memiliki akses modal, pasar, atau pendampingan lanjutan. Di sinilah terletak ironi kebijakan: pemberdayaan yang dilangsungkan justru memperkuat ketergantungan karena tidak membongkar struktur penghalang.

Lebih dalam, kegagalan dalam membangun keadilan distributif juga berkaitan dengan absennya redistribusi sumber daya strategis. Tanah, air, pendidikan berkualitas, dan teknologi tetap berada dalam kendali segelintir elite lokal. Negara, melalui kebijakan investasinya, gagal menantang struktur ini dan justru ikut melegitimasi dominasi tersebut melalui narasi netralitas dan efisiensi. Hal ini memperkuat kritik bahwa investasi sosial di Indonesia—khususnya di daerah seperti Bima lebih merepresentasikan manajemen kemiskinan daripada transformasi ketimpangan.

Akhirnya, riset ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi sosial gagal merealisasikan agenda etis dari welfare state: yakni menghadirkan negara sebagai agensi keadilan.

Rasionalitas administratif menggantikan solidaritas sosial; performativitas menggantikan substansi. Yang tersisa adalah kebijakan tanpa jiwa, program tanpa visi, dan negara tanpa empati. Maka, diperlukan reimajinasi kebijakan sosial yang tidak hanya berbicara tentang keterampilan dan produktivitas, tetapi juga tentang distribusi kuasa, keadilan historis, dan rekognisi terhadap pengalaman lokal sebagai basis etika formulasi kebijakan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan investasi sosial yang diimpor secara normatif dari wacana global neoliberal ke dalam konteks lokal Kabupaten Bima bukan hanya tidak efektif secara administratif, tetapi juga membawa implikasi ideologis yang membahayakan struktur sosial masyarakat. Alih-alih berfungsi sebagai instrumen emansipatoris untuk mengurangi ketimpangan, paradigma investasi sosial di Bima telah menjelma menjadi mekanisme kooptasi yang mereproduksi dominasi melalui rasionalitas teknokratis. Dalam narasi ini, terminologi seperti “pemberdayaan”, “kapasitas manusia”, dan “mobilisasi keterampilan” menjadi eufemisme bagi praktik depolitisasi kebutuhan rakyat.

Secara empiris, kebijakan tersebut gagal menciptakan keterhubungan antara pelatihan keterampilan dan akses kerja yang riil. Skema pelatihan lebih mencerminkan kepatuhan pada indikator birokrasi daripada kehendak untuk membongkar struktur penghambat kesejahteraan. Negara hadir bukan sebagai fasilitator distribusi keadilan, tetapi sebagai distributor ilusi melalui data dan narasi performatif. Hasil akhirnya adalah reproduksi ketimpangan dalam bentuk baru: kemiskinan yang dikelola, bukan diatasi.

Lebih jauh, negara cenderung mengabaikan realitas partikular masyarakat dengan mereduksi kompleksitas lokal ke dalam model kebijakan universalistik yang ahistoris. Ketiadaan mekanisme deliberatif yang inklusif telah menguatkan dominasi elite lokal atas sumber daya strategis. Maka, dalam konteks Bima, investasi sosial bukan hanya gagal secara kebijakan, tetapi juga secara moral: ia melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan, partisipasi, dan pengakuan.

Untuk itu, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi ulang paradigma kebijakan sosial yang berangkat dari pengalaman lokal, keadilan historis, dan resistensi terhadap dominasi global. Hanya dengan cara ini, kebijakan dapat kembali bermakna sebagai alat transformasi sosial, bukan sebagai instrumen pelanggeng ketidakadilan yang dibungkus dalam nama pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Benería, L., Berik, G., & Floro, M. (2016). *Gender, development and globalization: Economics as if all people mattered*. Routledge.
- Bonoli, G. (2010). The political economy of active labour-market policy. *Politics & Society*, 38(4), 435–457. <https://doi.org/10.1177/0032329210381235>
- Bourdieu, P. (1998). *Acts of resistance: Against the new myths of our time*. Polity Press.
- Cerny, P. G. (1997). Paradoxes of the competition state. *Government and Opposition*, 32(2), 251–274. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1997.tb00161.x>
- Dardot, P., & Laval, C. (2014). *The new way of the world: On neoliberal society*. Verso Books.
- Esping-Andersen, G. (2002). *Why we need a new welfare state*. Oxford University Press.
- Ferguson, J. (1990). *The anti-politics machine: Development, depoliticization, and bureaucratic power in Lesotho*. University of Minnesota Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*. Pantheon Books.
- Fraser, N. (1995). From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a 'post-socialist' age. *New Left Review*, 212, 68–93.
- Garritzmann, J. L., Häusermann, S., & Palier, B. (2022). *The world politics of social investment*. Oxford University Press.
- Giddens, A. (1998). *The third way: The renewal of social democracy*. Polity Press.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hemerijk, A. (2013). *Changing welfare states*. Oxford University Press.
- Hickey, S., & du Toit, A. (2007). Adverse incorporation, social exclusion and chronic poverty. CPRC Working Paper No. 81. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1753796>
- Illich, I. (1977). *Disabling professions*. Marion Boyars.
- Jenson, J. (2010). Diffusing ideas for after neoliberalism: The social investment perspective in Europe and Latin America. *Global Social Policy*, 10(1), 59–84. <https://doi.org/10.1177/1468018109354813>
- Jessop, B. (2002). *The future of the capitalist state*. Polity Press.
- Jessop, B. (2015). *The state: Past, present, future*. Polity Press.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender & Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>

- Morel, N., Palier, B., & Palme, J. (2012). *Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and challenges*. Policy Press.
- Navarro, V. (2007). Neoliberalism as a class ideology. *International Journal of Health Services*, 37(1), 47–62. <https://doi.org/10.2190/7901-367G-7UCU-4PUD>
- OECD. (2011). *Divided we stand: Why inequality keeps rising*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264119536-en>
- Peck, J. (2001). *Workfare states*. Guilford Press.
- Scharpf, F. W. (1999). *Governing in Europe: Effective and democratic?* Oxford University Press.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Standing, G. (2011). *The precariat: The new dangerous class*. Bloomsbury Academic.
- Therborn, G. (2013). *The killing fields of inequality*. Polity Press.
- World Bank. (2013). *World development report: Jobs*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9575-2>